



KURIKULUM 1984

TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD)
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA (SMTP)
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS (SMTA)

PEDOMAN PEMBINAAN GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA

DIPERBAHARUI TERBATAS
KHUSUS UNTUK PENATARAN

**DIPERDANYAK TERBATAS
KHUSUS UNTUK PENATARAN**

16.568/2007

PENGANTAR

Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya seperti yang tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan pada pasal 31 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan No. 11/MPR/1983 telah menentukan kebijaksanaan pendidikan nasional.

Salah satu unsur dalam GBIIN 1983, yang belum tercantum dalam Kurikulum 1975/1976/1977, adalah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam rangka Pendidikan Pancasila yang terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran nasional sebagai satu bangsa, menanamkan rasa cinta tanah air, dan merangsang kemampuan daya cipta dan pembaharuan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan serta membina kepribadian bangsa melalui proses perpaduan dan pemribadian jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

Guna memperpadukan unsur baru tersebut dalam kurikulum yang sedang berjalan, maka untuk semua jenis dan jenjang pendidikan telah dikembangkan : (1) Kebijakan Pokok tentang Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa; (2) Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), dan (3) Seperangkat pedoman, yaitu Pedoman Proses Belajar-Mengajar, Pedoman Penilaian, dan Pedoman Pembinaan Guru Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Di samping itu telah di kembangkan pula pedoman, program, materi dan bahan penyerta penataran yang terutama berfungsi mempersiapkan para guru dan pembina.

Setiap guru dan pembina perlu benar-benar mendalami unsur-unsur serta implikasi pelaksanaan program Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa bertujuan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meningkatkan Pendidikan Pancasila, serta meneruskan dan mengembangkan jiwa, se-

mangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dengan memberikan penekanan pada ranah sikap dan nilai yang mendorong semangat, merangsang ilham, dan menycimbangkan kepribadian.

Dalam rangka mencapai tujuan seperti yang dimaksudkan, maka kedudukan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ditetapkan sebagai satu mata pelajaran yang berdiri sendiri yang merupakan bagian terpadu dari program pendidikan Pancasila dan program inti. Waktu untuk Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa disediakan melalui penjatahan kembali struktur program setiap lembaga pendidikan, tanpa menambah jam pelajaran.

Materi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ditetapkan berdasarkan pendekatan episode dalam konteks kurun waktu mulai dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan era pengisian kemerdekaan. Pemilihan episode dimulai dari peristiwa setempat yang berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia dan disajikan dalam suatu kebulatan melalui pendekatan berbagai mata (dimensi).

Dalam proses belajar - mengajar, pendekatan yang digunakan didasarkan atas pendidikan nilai-nilai dan peran serta aktif siswa. Pendekatan ini juga memperhatikan tingkat usia siswa dalam interaksinya dengan guru, sesama siswa, dan bahan pelajaran, sehingga memperlancar proses sosialisasi serta kebudayaan berbagai nilai dan semangat. Metode yang digunakan adalah metode yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar - mengajar, sehingga pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang diharapkan dalam Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dapat terwujud dengan baik. Metode - metode tersebut antara lain ceramah bervariasi, diskusi, sosiodrama, bermain peran, dan karyawisata.

Sasaran dan penilaian direncanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan motivasi belajar dan memperkuat proses pembentukan nilai - nilai. Oleh karena itu, sasaran penilaian adalah ranah afektif dari tujuan pendidikan yang dicandra melalui penga-

matan terhadap tingkah laku sehari-hari dan penggunaan alat penilaian yang bervariasi.

Guna menjamin terlaksananya Kurikulum Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan usaha pengembangan dan pengadaan sarana dan sumber belajar, seperti penulisan buku pelajaran dan buku bacaan untuk siswa, buku pegangan dan buku petunjuk untuk guru, serta buku penunjang lainnya; pengembangan, pengadaan, dan pemanfaatan sarana dan sumber belajar seperti drama sejarah, film sejarah, nyanyian kepahlawanan, museum, gambar dinding, situs sejarah, dan monumen, terutama yang bertalian dengan peristiwa-peristiwa penting, dalam upaya membina semangat perjuangan bangsa dan persatuan bangsa. Di samping itu, diterapkan pula sistem pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesional para guru.

Perlu diketahui bahwa Kurikulum Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ini telah saya putuskan untuk dilaksanakan mulai tahun ajaran 1984 / 1985. Untuk menunjang kebijaksanaan tersebut, sejak tahun ajaran 1983 / 1984 telah dan akan dilakukan berbagai kegiatan seperti penjelasan kepada para guru, petugas lapangan, orang tua siswa, dan masyarakat luas, penyaluran buku-buku Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, serta penataran guru, kepala sekolah, penilik dan pengawas, serta pembina lainnya. Berbagai umpan balik yang diperoleh dari forum penataran dan pelaksanaan di lapangan akan diramu ke dalam proses pengembangan Kurikulum Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa selanjutnya dalam rangka pengembangan kurikulum jangka panjang.

Jakarta, Juni 1984

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nugroho Notosusanto



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 026 / U / 1985

tentang

PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA DI TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA, DAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Oktober 1983 No. 0462/U/1983 telah ditetapkan tentang Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Bidang / Program Pendidikan Yang Berdiri Sendiri ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Mei 1984 No. 0208/U/1984 telah ditetapkan tentang Pengaturan Kembali Waktu Dalam Struktur Program Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah Sehubungan Dengan Dijadikannya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Sebagai Bidang/Program Pendidikan Yang Berdiri Sendiri;

- c. berhubung dengan hal tersebut pada sub a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Garis—Garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa di Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Mengingat** : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 ;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 2. Nomor 45/M Tahun 1983 ;
 3. Nomor 15 Tahun 1984 ;
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008e/U/1975 ;
 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 ;
 3. tanggal 11 September 1980 No. 0222f/O/1980 ;
 4. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983 ;
 5. tanggal 22 Oktober 1983 No. 0462/U/1983 ;
 6. tanggal 2 Mei 1984 No. 0209/U/1984 ;
 7. tanggal 15 Oktober 1984 No. 0486/U/1984.

Memperhatikan ; Saran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PELAKSANAAN GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA DI TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA, DAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Memberlakukan pelaksanaan Garis-garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Garis-garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa tersebut pada pasal 1 adalah sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan tersebut pada Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tahun pengajaran 1985 / 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 1985.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

Prof. Dr. Nugroho Notosusanto

I. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Pengertian pembinaan pada umumnya adalah rangkaian usaha pemberian bantuan kepada guru terutama bantuan berwujud pelayanan profesional, yang dilakukan oleh kepala sekolah, penilik atau pengawas, dan pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar-mengajar.

Pembinaan guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa adalah rangkaian usaha yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, penilik/pengawas secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan proses belajar-mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa di tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas.

Pembinaan pada hakikatnya adalah supervisi, yang lebih menekankan pelayanan profesional daripada pelayanan administratif, sejalan dengan itu, pembinaan guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa lebih mengarahkan kepada penekanan pelayanan profesional.

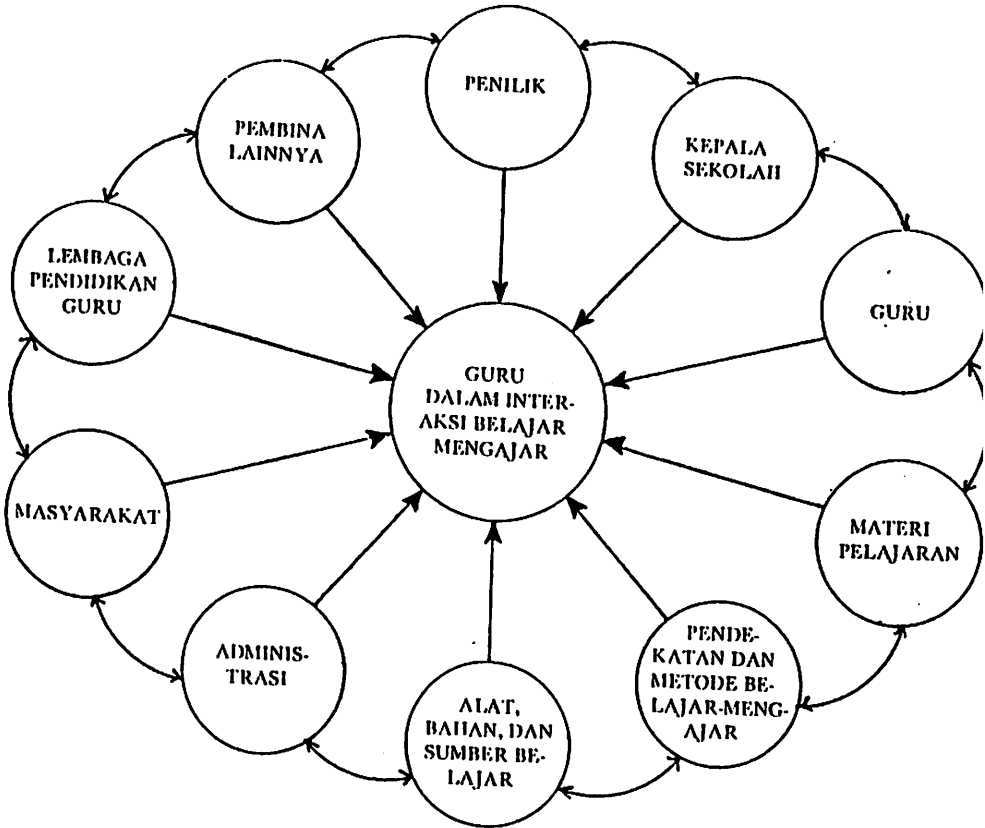
2. Tujuan

Pembinaan guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa bertujuan meningkatkan proses belajar-mengajar, melalui pemberian bantuan yang bercorak pelayanan profesional kepada para guru/pengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Jika proses belajar-mengajar meningkat, hasil belajar-mengajar diharapkan meningkat pula. Dengan demikian, rangkaian usaha pelayanan profesional akan memperlancar pencapaian tujuan kegiatan belajar-mengajar.

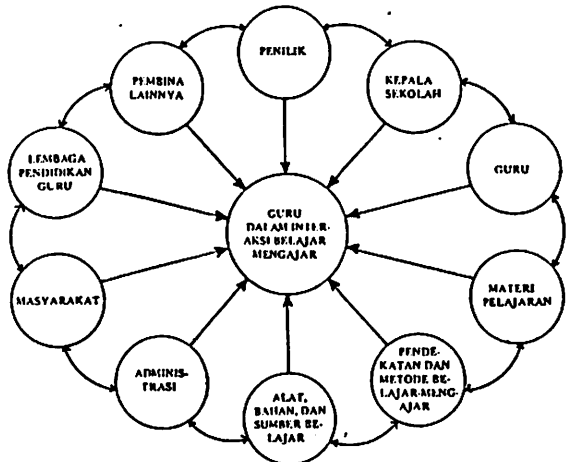
3. Sasaran

Sasaran utama pembinaan adalah guru/pengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Pendidikan Nonformal.

KEDUDUKAN GURU SEBAGAI TITIK PUSAT PEMBINAAN



SEBAGAI TITIK PUSAT PEMBINAAN



4. Ruang lingkup

Pokok-pokok pikiran dalam pedoman pembinaan guru ini pada prinsipnya berlaku pula bagi guru mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, uraian dalam pedoman ini lebih ditujukan kepada guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

Ruang lingkup pembinaan guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Guru atau tenaga pengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa di taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah menengah tingkat atas, dan pendidikan nonformal baik negeri maupun swasta.
- b. Penguasaan materi mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa oleh guru atau tenaga pengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa.
- c. Pelaksanaan proses belajar-mengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa lebih menitikberatkan pengembangan nilai dan sikap siswa daripada pengetahuan dan keterampilannya. Dengan kata lain, proses ini lebih menekankan pengembangan ranah afektif daripada ranah kognitif dan ranah psikomotorik dalam kepribadian individu.
- d. Tersedianya, sarana penunjang proses belajar-mengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa.
- e. Pemanfaatan sarana penunjang secara intensif oleh guru dan siswa, termasuk cara mencari dan menemukan sumber informasi pendidikan sejarah perjuangan bangsa, cara membuat alat bantu belajar-mengajar, dan pemeliharaannya.
- f. Cara penilaian ranah afektif yang dilakukan oleh guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

II. LANDASAN PEMBINAAN

1. Landasan

Pembinaan yang menekankan pelayanan profesional hendaklah didasarkan pada beberapa landasan yang relevan, yakni :

- a. kepercayaan bahwa guru-guru memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan diri;
- b. kepercayaan bahwa guru memiliki motivasi untuk mencapai tujuan secara berdayaguna;
- c. hubungan antara para pembina dan guru-guru berdasarkan hubungan kerabat kerja;
- d. pelayanan profesional didasarkan pada pandangan yang obyektif; dan
- e. pelayanan profesional didasarkan pada hubungan manusiawi.

2. Prinsip Pembinaan

Berdasarkan kelima landasan itu, prinsip-prinsip berikut ini perlu diperhatikan :

- a. Pembinaan dilakukan sesuai dengan apa yang diperlukan guru, beranjak dari kebutuhan yang dirasakan;
- b. Pembinaan ditunjang dengan semangat keteladanan dan sikap terbuka;
- c. Pembinaan dilakukan secara terus-menerus dan terpadu;
- d. Pembinaan dilaksanakan melalui berbagai wadah dan jalur yang ada;
- e. Pembinaan dapat diperlancar melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi, baik secara horisontal maupun vertikal, pada tingkat pusat maupun tingkat daerah;
- f. Guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa seyogyanya mampu meneruskan nilai-nilai perjuangan kepada siswa yang diasuhnya melalui penampilan sikap/perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan bangsa.

3. Ciri-ciri

Pelayanan profesional ditandai oleh ciri-ciri tindakan sebagai berikut :

- a. Meneliti keadaan proses belajar-mengajar yang terjadi seperti apa adanya;
- b. Menilai proses belajar-mengajar berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari telaah dan musyawarah bersama;
- c. Meningkatkan proses belajar-mengajar melalui dialog yang kreatif;
- d. Memberi bantuan proses belajar-mengajar melalui cara yang dimengerti oleh guru;
- e. Hubungan dalam pembinaan antara pembina dan guru bersifat demokratis-informal.

III. PROGRAM PEMBINAAN

Program pembinaan merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan pembinaan guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

Program pembinaan yang disusun oleh kepala sekolah, penilik, pengawas, atau oleh para pembina lainnya hendaknya saling melengkapi dan terpadu.

1. Program Pembinaan Kepala Sekolah

Kepala sekolah hendaknya menyusun rencana kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pembinaan yang diperinci menurut caturwulan dan semester;
- b. pembinaan dalam penyusunan persiapan mengajar;
- c. pembinaan dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar;
- d. pembinaan dalam pengadaan, penggunaan, dan perawatan alat bantu belajar-mengajar;
- e. pembinaan dalam penilaian, dan
- f. pembinaan dalam penentuan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan proses belajar-mengajar.

2. Program Pembinaan Penilik atau Pengawas

Penilik atau pengawas hendaknya menyusun rencana kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pembinaan dalam menyusun persiapan mengajar;
- b. pembinaan dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar;
- c. pembinaan dalam pelaksanaan penilaian;
- d. pembinaan dalam penentuan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan proses belajar-mengajar melalui pelayanan antarsekolah, yakni pelayanan antarguru dan antarkepala sekolah.

3. Program Pembinaan Pembina Lainnya

Para pembina lainnya, seperti kepala sekolah, pimpinan yayasan, kepala bidang, dan kepala seksi hendaknya menyusun rencana kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pembinaan dalam rangka meningkatkan daya scrap pencapaian tujuan mata pelajaran;
- b. pembinaan dalam rangka tindak lanjut, peningkatan, dan pengembangan hasil penataran;
- c. pembinaan dalam pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan pengajaran;
- d. pembinaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber data/informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengajaran;
- e. pembinaan untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarstaf pengelola.

Dalam menyusun program, para kepala sekolah, penilik/pengawas, atau pembina lainnya dalam wilayah tertentu dapat menyusun rencana kegiatan bersama. Dengan demikian, ada program kerja sama kepala sekolah. Program kerja sama para penilik/pengawas, dan ada program kerja sama para staf pembina lainnya. Selain itu, dapat disusun program kerja sama para kepala sekolah dan penilik/pengawas, dan program kerja sama para kepala sekolah, penilik/pengawas, dan pembina lainnya.

IV. ORGANISASI DAN MEKANISME PEMBINAAN

Pembinaan dalam rangka peningkatan proses belajar-mengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa dilaksanakan melalui wadah yang sudah ada atau wadah baru yang perlu dibentuk untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan motivasi para pelaksana dalam upaya meningkatkan kemampuan profesionalnya serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pembinaan. Organisasi dan mekanisme pembinaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Pembinaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

a. Guru

Dalam sistem pembinaan lama guru sering hanya dianggap sebagai obyek pembinaan. Sebenarnya potensi guru sebagai pelaku pembinaan di sekolah cukup besar dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Guru yang sudah ditatar dapat membina teman guru lain dalam forum rapat guru dengan semangat saling *asih*, saling *asah*, dan saling *asuh*.

a. KKG dan (MGBS)

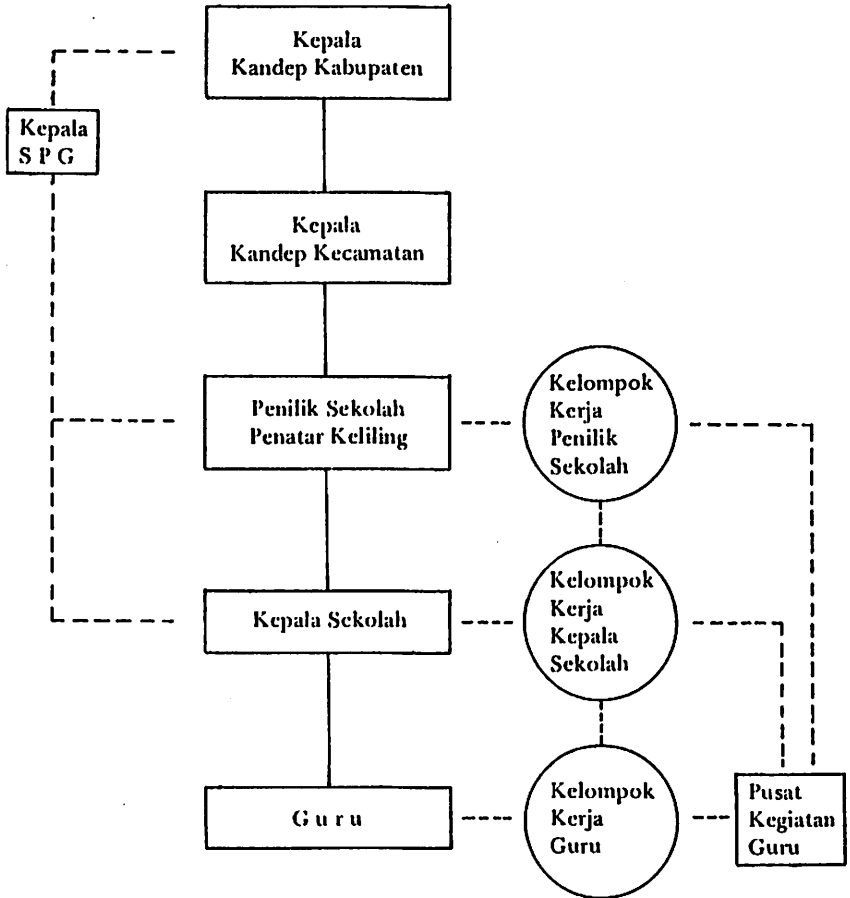
Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS) mengadakan diskusi, membuat alat peraga, menentukan dan memecahkan masalah, menyusun program, membuat persiapan mengajar, mengadakan simulasi proses belajar-mengajar dan berbagai kegiatan lain guna meningkatkan kemampuan serta keterampilan mereka dalam proses belajar-mengajar. Beberapa KKG dapat membentuk Pusat Kegiatan Guru.

b. Kepala Sekolah , sebagai manajer peng- ajaran bertugas melak- sanakan pembinaan se- hari-hari dalam pelaksa- naan mata-mata pelajar- an di sekolah c. Penilik/Pengawas , adalah pembina lapang- an yang bertugas mem- berikan bimbingan ser- ta pelayanan profesio- nal bagi guru-guru dan kepala sekolah. d. Penasihat Bidang Studi di propinsi dan kabu- paten yang secara khu- sus bertugas memberi- kan bimbingan, petun- juk, pengasahan, serta pengendalian bagi guru-	b. KKKS Kelompok Kerja Ke- pala Sekolah (KKKS) merupakan wadah ko- ordinasi dalam upaya melakukan pembinaan mata-mata pelajaran, termasuk melakukan pembinaan kemampu- an guru. Pembentukan KKKS dilaksanakan menurut kebutuhan sesuai dengan tingkat pendidikan masing- masing. c. KKPS/KKP Kelompok Kerja Peni- lik Sekolah (KKPS) atau Kelompok Kerja Pengawas (KKP) se- bagai wadah untuk mengadakan diskusi dan tukar-menukar in- formasi, menemukan masalah atau kegiatan lainnya dalam upaya memperoleh kesera- gaman dalam melak- sanakan pembinaan. d. Tim Penasihat Ahli Bi- dang Studi merupakan wadah koordinasi para penasihat ahli mata pe- lajaran dalam upaya memperoleh kesera- gaman dalam melaku-
--	---

guru dalam penggunaan dan pengembangan baik materi mata pelajaran maupun proses belajar-mengajarnya. c. Pembina Lainnya baik di tingkat kecamatan/kabupaten/pro-pinsi maupun pusat yang bertugas memberikan bimbingan dan pengarahan serta bantuan material mata pelajaran bagi para kepala sekolah dan guru.	kan pembinaan dan pengendalian. e. TKPD Tim Koordinasi Pembina Daerah/Pusat merupakan wadah koordinasi para pembina dalam upaya melakukan pengendalian dan pengembangan mata pelajaran serta memberikan penataran tingkat pusat maupun daerah.
--	---

Mengenai pengorganisasian secara nyata terlihat pada koordinasi pembinaan profesional secara horisontal dan vertikal untuk tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar di tingkat kabupaten, serta untuk sekolah menengah tingkat pertama dan sekolah menengah tingkat atas dapat secara jelas dilihat pada dua bagan berikut ini.

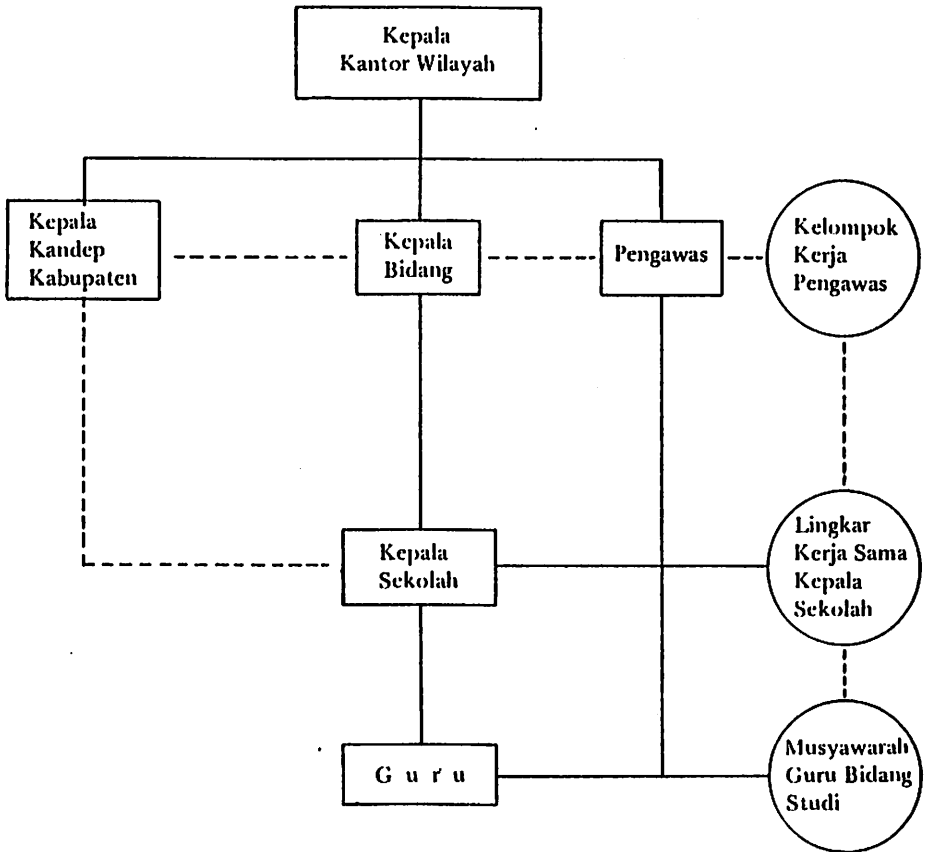
**KOORDINASI PEMBINAAN PROFESIONAL SECARA
HORIZONTAL DAN VERTIKAL UNTUK TK/SD
DI TINGKAT KABUPATEN**



Keterangan :

- Garis pembinaan profesional
 Garis konsultasi

**KOORDINASI PEMBINAAN PROFESIONAL SECARA
HORIZONTAL DAN VERTIKAL UNTUK SMTP/SMTA**



Keterangan :

- Garis pembinaan menyeluruh mengenai bidang teknis edukatif, sarana/prasarana, administrasi/pembinaan profesional.
- - - - - Garis konsultasi/koordinasi.

2. Mekanisme Kerja Pembinaan Guru Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

- a. Guru yang sudah mengikuti penataran pendidikan sejarah perjuangan bangsa menjadi "penanggung jawab" mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan bangsa di sekolah dan di bawah bimbingan dan pengawasan kepala sekolah, membina teman guru lain melalui rapat guru atau pertemuan profesional setiap minggu sekali. Persoalan proses belajar-mengajar yang belum dapat dipecahkan di sekolah dapat diajukan ke penilik sekolah atau kepada kelompok kerja guru atau musyawarah guru bidang studi.
- b. KKG/MGBS membahas masalah proses belajar-mengajar yang disampaikan oleh guru atau kepala sekolah, mengadakan simulasi proses belajar-mengajar, membuat alat bantu belajar-mengajar, menjabarkan program dari Pusat Kegiatan Guru dan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan sekolah. Masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh KKG/MGBS dapat diajukan ke Pusat Kegiatan Guru.
- c. Kepala sekolah bersama guru menyusun program (tahunan, semester/caturwulan, bulanan, dan mingguan) pendidikan sejarah perjuangan bangsa, anggaran belanja sekolah, serta program kegiatan lainnya, mengadakan pertemuan dengan guru atau BP3, mengadakan kunjungan kelas serta membuat laporan kepada penilik/kepala bidang. Masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan berkenaan dengan proses belajar-mengajar dapat disampaikan kepada KKG atau Pusat Kegiatan Guru, sedangkan mengenai pembinaan kepada KKKS atau KKPS/KKP.
- d. Pusat Kegiatan Guru (di tingkat kecamatan atau kabupaten) menyusun program kegiatan yang mencakup semua KKG yang ada di lingkungannya, mengadakan pertemuan dengan pimpinan KKG atau dengan para guru Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan

Bangsa, dan mengundang penilik/pengawas atau penasihat ahli mata pelajaran. Masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan di Pusat Kegiatan Guru, terutama masalah kebutuhan yang bersifat material, disampaikan kepada KKKS dan KKPS/KKP.

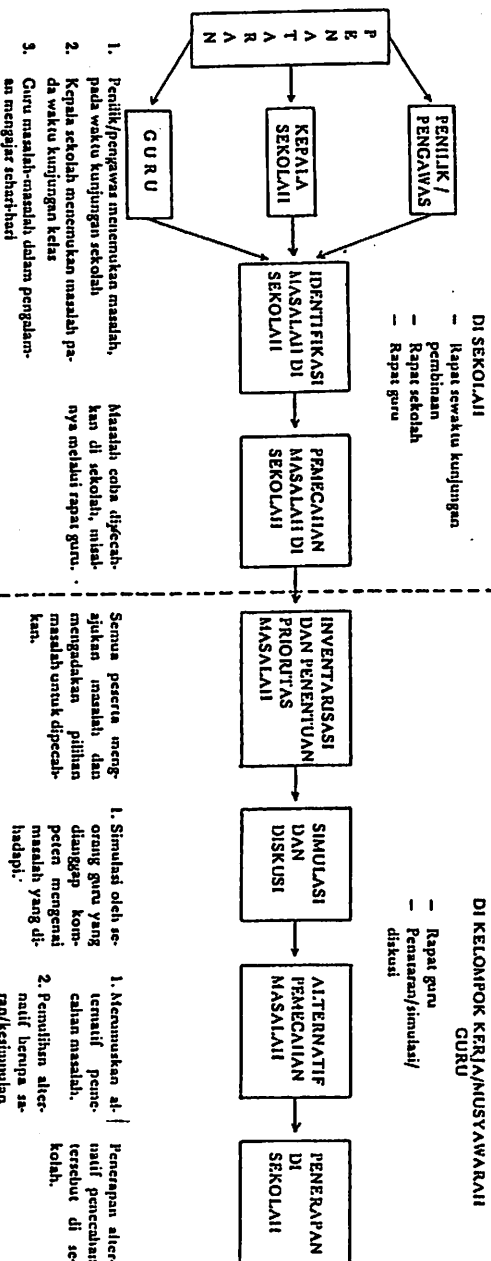
- e. KKKS membahas dan memecahkan masalah bersama yang berkenaan dengan pembinaan guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta masalah yang disampaikan oleh Pusat Kegiatan Guru dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah. Masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh KKKS disampaikan kepada KKPS/KKP.
- f. Penilik sekolah/pengawas melakukan kunjungan pembinaan ke sekolah-sekolah, KKG/MGBS, dan Pusat Kegiatan Guru, memberikan pelayanan profesional kepada guru dan kepala sekolah, melakukan evaluasi untuk memperoleh umpan balik dalam melaksanakan pembinaan, memecahkan masalah yang disampaikan oleh kepala sekolah, KKKS, dan Pusat Kegiatan Guru, serta mengolah laporan dari sekolah dan membuat laporan kepada pembina. Masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh penilik sekolah/pengawas disampaikan kepada KKPS/KKP atau Kasi/Kabid terutama mengenai pembinaan, sedangkan masalah kebutuhan material disampaikan kepada pembina (Kandep/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
- g. KKPS/KKP memecahkan masalah yang disampaikan oleh KKKS atau penilik/pengawas, memecahkan masalah bersama mengenai pembinaan guru pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau kepala sekolah, dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh penilik/pengawas. Masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan KKPS/KKP disampaikan kepada Kasi dan Kabid, sedangkan yang menyangkut masalah lain disampaikan kepada Pembina (Kanwil/Kandep dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).

- h. Penasihat ahli mata pelajaran memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahannya secara khusus mengenai Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, melayani permohonan atau undangan baik dari KKG/MGBS maupun dari Pusat Kegiatan Guru, menelaah serta mengembangkan materi pendidikan sejarah perjuangan bangsa, dan memberikan saran kepada para pembina dalam usaha melengkapi dan memperkaya sumber belajar.
- i. Tim Penasihat ahli mata pelajaran memecahkan masalah-masalah bersama yang disampaikan oleh KKG dan Pusat Kegiatan Guru serta menyusun program penataran di KKG dan Pusat Kegiatan Guru.
- j. Pembina Daerah/Pusat memberikan petunjuk, pengarahannya, dan pengendalian sesuai dengan kewenangan masing-masing serta mengolah laporan yang diterima untuk dijadikan umpan balik dalam pembinaan lebih lanjut.
- k. Tim Pembina Daerah/Pusat mengadakan koordinasi kerja dengan instansi lain yang setingkat sesuai dengan wilayah kerja dan kewenangan masing-masing, menyelenggarakan penataran pendidikan sejarah perjuangan bangsa, serta memecahkan masalah-masalah bersama baik yang bersifat regional maupun nasional.
TKPD juga bertugas untuk mengadakan pemantauan sebagai tindak lanjut penataran dalam usaha meningkatkan mutu program penataran berikutnya.

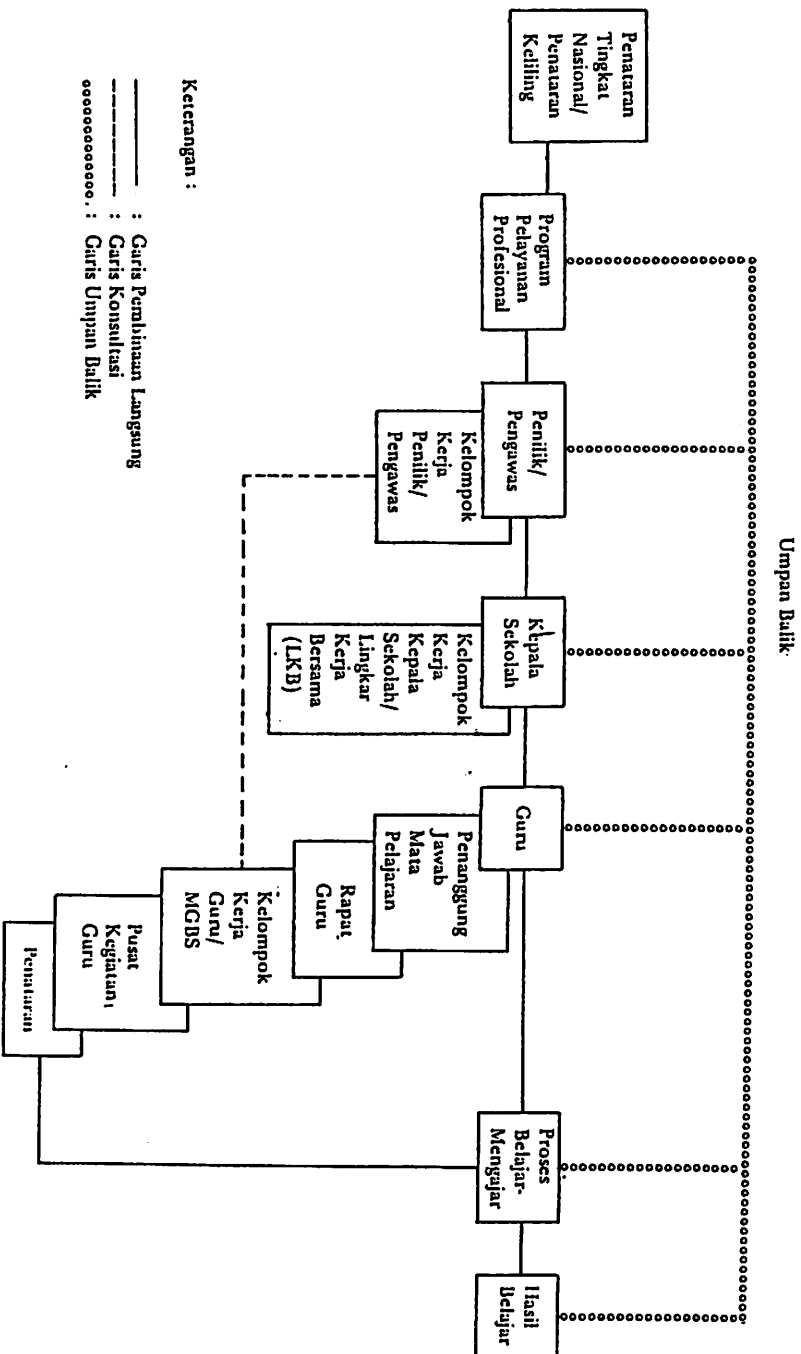
Pembinaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa dilaksanakan melalui tiap jalur, yaitu jalur vertikal, horisontal, dan fungsional. Masing-masing jalur terbagi dalam hubungan langsung dan tidak langsung (formal dan informal).

Mengenai arus kegiatan pemecahan masalah di sekolah dan KKG/MGBS serta mekanisme pembinaan guru secara terus-menerus dapat dilihat pada dua bagan berikut ini.

ALUR KEGIATAN PEMECAHAN MASALAH DI SEKOLAH DAN KKG/NGS



MEKANISME PENIBINAAN GURU SECARA TERUS-MENERUS



Keterangan :

- : Garis Pembinaan Langsung
- - - - - : Garis Konsultasi
- oooooooooooo : Garis Umpan Balik

V. TEKNIK PEMBINAAN

Dalam Buku *Pedoman Administrasi dan Supervisi Kurikulum 1975/1976/1977* banyak disebutkan tentang teknik-teknik supervisi. Pada bagian ini diuraikan beberapa contoh teknik supervisi atau pembinaan yang bercorak pelayanan profesional untuk meningkatkan proses belajar-mengajar berbagai mata pelajaran, khususnya Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, antara lain kunjungan kelas, pertemuan pribadi, kunjungan antarsekolah, diskusi dalam kelompok-kelompok kerja, kunjungan antarsekolah dan rapat dewan guru.

Berdasarkan kenyataan selama ini karena adanya hambatan dan kekurangan, maka pelaksanaan pembinaan guru kebanyakan ditekankan pada pembinaan administratif. Hal ini perlu diperbaiki tahap demi tahap ke arah penekanan pembinaan profesional sesuai dengan hakikat supervisi.

1. Kunjungan Kelas

Kunjungan kelas yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dan penilik atau pengawas bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar-mengajar. Dengan kunjungan kelas, kepala sekolah, dan penilik atau pengawas dapat mengambil beberapa manfaat, antara lain :

- a. dapat menemukan kelebihan atau kekurangan guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar guna pengembangan dan pembinaan lebih lanjut;
- b. dapat secara langsung mengetahui keperluan masing-masing guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar;
- c. dapat memperoleh data atau informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan program pelayanan profesional secara terperinci, dan
- d. dapat menumbuhkan percaya diri guru untuk berbuat lebih banyak.

Kunjungan kelas dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Kunjungan kelas yang direncanakan atau dipersiapkan lebih dulu, yang dapat diperinci dalam kunjungan kelas :
 - a) yang direncanakan oleh kepala sekolah dan diberitahukan kepada guru yang bersangkutan,
 - b) yang direncanakan oleh kepala sekolah tetapi tidak diberitahukan lebih dahulu kepada guru yang bersangkutan, dan
 - c) yang direncanakan oleh guru yang bersangkutan dengan mengundang kepala sekolah atau penilik/pengawas untuk mengadakan kunjungan kelas.
- 2) Kunjungan kelas tanpa persiapan atau tujuan tertentu. Kita dapat memahami bahwa kunjungan kelas yang tidak direncanakan atau dipersiapkan tidak memberikan banyak manfaat bagi peningkatan dan pengembangan kemampuan dan sikap guru yang bersangkutan, meskipun ada juga manfaatnya dari segi-segi lain.

Kunjungan kelas yang berhasil baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Memiliki tujuan-tujuan tertentu yang jelas;
- b) Mengungkapkan aspek-aspek yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru;
- c) Memakai format supervisi tertentu untuk menginventarisasi data yang obyektif;
- d) Terjadi interaksi antara pihak yang membina dengan pihak yang dibina sehingga menimbulkan sikap saling pengertian;
- e) Pelaksanaan kunjungan kelas tidak mengganggu proses belajar-mengajar.

Perlu diingat bahwa pengisian format bukanlah merupakan tujuan akhir pelayanan profesional. Pengisian format yang baik merupakan langkah utama untuk tindakan pembinaan selanjutnya.

2. Pertemuan Pribadi

Pertemuan pribadi ialah pertemuan, percakapan, dialog, atau tukar pikiran antara kepala sekolah dengan guru, atau kepala sekolah dengan penilik/pengawas, mengenai usaha-usaha peningkatan kemampuan profesional guru. Pertemuan dapat bersifat formal atau informal, dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau agak lama, dapat diadakan sebelum atau sesudah kunjungan kelas.

3. Rapat Dewan Guru

Rapat dewan guru sering disebut juga rapat sekolah atau rapat staf merupakan pertemuan antara seluruh guru dan kepala sekolah, yang dipimpin oleh kepala sekolah atau seseorang yang ditunjuk olehnya. Pertemuan ini membicarakan berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan.

Rapat dewan guru merupakan sarana komunikasi langsung antara pimpinan dan seluruh guru dan antara sesama guru. Oleh karena itu, rapat sekolah merupakan suatu keharusan dalam pengelolaan sekolah.

Secara umum maksud mengadakan rapat dewan guru adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengatur seluruh anggota staf yang berbeda pendidikan, pengalaman, dan kemampuannya menjadi satu keseluruhan potensi yang sadar akan tujuan bersama dan bersedia untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama itu;
- b. untuk mendorong tiap anggota agar mengetahui tanggung jawab masing-masing dan berusaha melaksanakannya dengan baik; dan
- c. untuk bersama-sama menentukan prosedur dan metode dalam melaksanakan proses belajar-mengajar.

4. Kunjungan Antarkelas

Kunjungan antarkelas dapat pula digolongkan sebagai satu teknik pelayanan atau pembinaan profesional. Guru

dari kelas yang satu berkunjung ke kelas yang lainnya dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dengan kunjungan antarkelas ini setiap guru akan memperoleh pengalaman baru tentang pelaksanaan proses belajar-mengajar, pengelolaan kelas, dan sebagainya.

5. Kunjungan Sekolah

Untuk mengetahui situasi pendidikan di suatu sekolah, seorang penilik atau pengawas perlu mengunjungi sekolah. Kunjungan sekolah yang dilaksanakan secara teratur akan memberikan masukan untuk mengetahui situasi sekolah secara lengkap, sehingga program pelayanan atau pembinaan yang direncanakan akan lebih berhasil guna.

Kunjungan sekolah ini dapat berbentuk kunjungan dengan atau tanpa pemberitahuan :

- a. Kunjungan dengan pemberitahuan. Sebelum berkunjung penilik atau pengawas telah memberitahukan terlebih dahulu kepada kepala sekolah secara langsung atau tak langsung. Selain waktu kunjungan, maksud kunjungan dapat diberitahukan kepada kepala sekolah dan guru, misalnya untuk mengetahui keberhasilan dan kesukaran yang dialami guru dalam mengajar. Dalam kunjungan seperti ini penilik atau pengawas dapat menilai usaha maksimal yang dilakukan guru.
- b. Kunjungan tanpa pemberitahuan. Penilik atau pengawas, sesuai dengan rencana kerjanya, mengunjungi suatu sekolah tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Kunjungan jenis ini mempunyai keuntungan, bahwa yang akan diamati di sekolah adalah keadaan yang sebenarnya. Penilik atau pengawas dapat menilai sikap dan kemampuan guru sebagaimana adanya.

6. Kunjungan Antarsekolah

Kunjungan antarsekolah dapat memberikan banyak manfaat. Dengan mengunjungi sekolah lain, guru-guru dapat mengukur sampai sejauh mana keberhasilan suatu sekolah yang dikunjungi. Hal-hal yang baik dapat dijadikan contoh.

Suatu hal yang harus diperhatikan ialah kunjungan itu jangan sampai mengganggu sekolah yang dikunjungi ataupun mengganggu kegiatan dari sekolah yang berkunjung. Karena itu, kunjungan hendaknya diatur dengan seksama.

7. Pertemuan dalam Kelompok Kerja

Pertemuan-pertemuan dalam kelompok kerja merupakan salah satu upaya pembinaan profesional. Berikut ini dikemukakan contoh program yang dapat dilaksanakan dalam kelompok kerja.

a. Tujuan

- 1) Menyatukan pandangan dan pengertian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, terutama yang menyangkut kegiatan belajar-mengajar.
- 2) Melatih para peserta untuk berani menyatakan pendapatnya dan berpikir secara kritis.
- 3) Menumbuhkan prakarsa dan daya cipta para peserta.

b. Materi dan Penyampaiannya

- 1) Pada tahap pertama dipilih materi yang berkenaan dengan hasil-hasil penataran. Para penyaji disebut nara sumber. Nara sumber telah diikutsertakan dalam penataran sebelumnya. Mereka menyampaikan hasil-hasil penataran. Para peserta mendiskusikan materi itu dan dipadukan antara materi yang diperoleh dari penataran dengan pengalaman di lapangan. Diskusi itu diharapkan dapat menghasilkan beberapa model mengajar, terutama mengenai metodologi dan alat bantu pelajaran.
- 2) Pada tahap berikutnya, diskusi dilanjutkan dengan membahas materi yang diperoleh dari lapangan. Sebelum diskusi ini dilaksanakan para peserta terlebih dahulu sudah mengamati guru yang sedang mengajar. Lamanya pengamatan ini dilaksanakan sesuai dengan keperluan.

Hasil pengamatan ini kemudian dibahas dalam :

- a) diskusi di KKKS yang menyangkut pembinaan/ pelayanan profesional;
- b) diskusi di KKG yang menyangkut kegiatan belajar-mengajar yang diamati itu; dan
- c) diskusi berikutnya dilakukan bersama antara KKKS dan KKG sehingga pada saat itu dapat dipertemukan pandangan-pandangan antara pihak yang dilayani dan pihak yang melayani.

Agar diperoleh gambaran tentang model proses belajar-mengajar sesuai dengan yang diharapkan, simulasi perlu dilakukan oleh nara sumber dari KKG.

Hasil pertemuan dalam kelompok kerja, berupa hasil diskusi, model persiapan mengajar, model alat bantu belajar-mengajar, dan sebagainya, dapat dibawa oleh kepala sekolah/guru untuk bekal bagi sekolah masing-masing dan dipakai sebagai bahan pengembangan lebih lanjut.

Rangkuman macam-macam teknik pembinaan yang meliputi arti, tujuan, serta keuntungan dan hambatan atau kelemahannya, disajikan dalam matriks berikut ini.

RANGKUMAN TEKNIK PENBIAYAAN / PELAYANAN PROFESIONAL

No.	TEKNIK PENBIAYAAN/PELAYANAN PROFESIONAL	KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN	TUJUAN	KELUANTUNGAN	HAMBATAN/ KELEMAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kunjungan kelas	Mengamati PBI di kelas	Mengetahui cara guru melaksanakan PBI	1. Dapat mengetahui kelebihan yang dapat dikembangkan 2. Dapat mengetahui kelemahan/kesalahan untuk perbaikan 3. Dapat memberikan perbaikan sesuai dengan kebutuhan	Guru mungkin merasa canggung/kurang bebas dalam melaksanakan PBI
2.	Peremuan pribadi	Penilik/pengawas langsung berhadapan dengan seorang guru	Bantuan secara khusus (karena masalah bersifat khusus)	1. Dapat berdialog secara langsung 2. Lebih terarah 3. Kelemahan tidak diketahui orang lain	Agak sulit menemukan waktu
3.	Rapat dewan guru	Kepala sekolah atau penilik/pengawas berhadapan dengan guru di satu sekolah	Memberi bantuan secara umum (karena masalahnya bersifat umum)	1. Bantuan dapat diberikan kepada seluruh guru dalam satu kali pertemuan 2. Akan terjadi tukar pikiran secara umum	
4.	Kunjungan antar kelas	Guru dari salah satu kelas mengunjungi kelas lain dalam sekolah yang bersangkutan	Mengetahui cara guru lain dalam pelaksanaan PBI, penerapan dan pemajangan kelas	1. Mengetahui cara guru lain dalam pelaksanaan PBI, penerapan dan pemajangan kelas, dan sebagainya 2. Hal-hal yang baik dapat dijadikan contoh 3. Hal-hal yang kurang baik dapat dijadikan bahan evaluasi diri atau bahan diskusi	1. Mungkin mengganggu PBI di kelas lain 2. Kelas senyap ditunggalikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Kunjungan sekolah	Tanpa pemberitahuan	Mengetahui keadaan sebenarnya	Dapat memberikan bimbingan aktual	Dianggap kurang demokratis
		Dengan pemberitahuan	Guru mengetahui maksud dan tujuan kunjungan	Kepala sekolah/guru dapat menunjukkan hasil usahanya	Mungkin tidak mencerminkan keadaan sehari-hari
		Karena diundang	Guru ingin mengetahui keberhasilannya	Dapat melayani kebutuhan khusus/setempat	Pengaturan waktu
6.	Kunjungan antarsekolah	Guru dari sekolah yang satu mengunjungi sekolah lain	Mengetahui bagaimana guru di sekolah lain melakukan PBM, penataan dan pemajangan kelas	1. Mengetahui bagaimana guru di sekolah lain melaksanakan PBM, mengelola kelas, dan sebagainya 2. Hal-hal yang baik dapat ditiru 3. Hal-hal yang kurang baik dijadikan bahan diskusi	1. Mungkin mengganggu pengajaran 2. Kelas sendiri ditinggalkan
7.	Pertemuan dalam kelompok kerja	1. Melihat simulasi atau praktek mengajar guru 2. Diskusi permasalahan yang ditemukan langsung di lapangan	1. Memecahkan masalah yang ditemukan dalam PBM 2. Memecahkan masalah tentang bantuan dan pelayanan yang diperlukan, berdasarkan penemuan langsung di lapangan 3. Membuat model persiapan mengajar dan alat peraga	1. Guru dapat menemukan langsung cara yang dianggap baik dalam PBM untuk diterapkan di kelasnya masing-masing 2. Kepala sekolah dapat menemukan langsung cara bantuan dan pelayanan yang dianggap baik untuk diterapkan di sekolahnya masing-masing 3. Tersedia alat-alat untuk membuat model	

VI. PERAN DAN TUGAS PEMBINA

Dalam usaha meningkatkan proses belajar-mengajar guna mencapai tujuan pengajaran secara memadai, diperlukan pelayanan secara khusus. Keberhasilan itu sangat ditentukan oleh peran kepala sekolah, penilik sekolah atau pengawas, dan para pembina lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam dunia pendidikan.

Tugas pembinaan atau pelayanan profesional merupakan tanggung jawab bersama secara terpadu yang sifatnya saling mengisi sehingga pembinaan secara utuh dalam pencapaian tujuan pendidikan atau pengajaran dapat terwujud.

1. Peran dan Tugas Kepala Sekolah

Kepala sekolah, sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana, dan pengawas semua kegiatan belajar-mengajar di sekolah, bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran di sekolahnya. Peran kepala sekolah sangat menentukan dalam membantu guru melaksanakan pengajaran maupun dalam upaya membantu meningkatkan dan mengembangkan proses belajar-mengajar di sekolahnya. Peran dan tugas kepala sekolah dalam pembinaan proses belajar-mengajar mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Membimbing guru menyusun program pengajaran dalam tiap caturwulan;
- b. Mengkoordinasikan dan membantu kegiatan penyusunan persiapan mengajar;
- c. Mengatur dan membimbing guru dalam pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar-mengajar dengan memperhatikan norma-norma penilaian. Penilaian ini dimaksudkan untuk tetap mengarahkan penyampaian segi kepribadian yang dituntut dan untuk memperbaiki proses belajar-mengajar;
- d. Berkonsultasi dan meminta petunjuk langsung kepada penilik atau pengawas dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dalam kegiatan belajar-

mengajar. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengajaran yang bersifat mendesak dan memerlukan pemecahan bersama.

2. Peran dan Tugas Penilik/Pengawas

Penilik atau pengawas berperan dan bertugas mengadakan supervisi kepada guru meningkatkan proses belajar-mengajar. Secara terperinci peran dan tugas itu adalah sebagai berikut :

- a. Memperhatikan keadaan kemajuan belajar di sekolah dan mengelompokkan masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam proses belajar-mengajar. Hasil pengamatannya diharapkan dapat dijadikan bahan supervisi ke sekolah-sekolah dalam wilayah pembinaannya dan sekaligus sebagai bahan perbaikan ataupun pengembangan pembinaan lebih lanjut;
- b. Berperan serta dalam penataran kepala sekolah/guru, guna meningkatkan penguasaan materi dan keterampilan mengajar;
- c. Mengadakan supervisi ke sekolah-sekolah secara terus-menerus. Supervisi ini dilakukan antara lain melalui kunjungan ke sekolah, observasi kelas, percakapan pribadi dengan kepala sekolah/guru, dan rapat bersama;
- d. Membantu kepala sekolah dan para guru guna memecahkan masalah yang berkenaan dengan proses belajar-mengajar;
- e. Mengevaluasi hasil kegiatan belajar-mengajar yang dicapai di sekolah dalam wilayah pembinaannya.

3. Peran dan Tugas Pembina Lainnya

Peran dan tugas pembina lainnya, seperti kepala kantor, pimpinan yayasan, kepala bidang, dan kepala seksi adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pembinaan, agar pembinaan di-

lakukan secara terus-menerus melalui penataran, lokakarya, diskusi, dan berbagai bentuk lainnya baik yang berkenaan dengan pendalaman materi pengajaran mata pelajaran tertentu pada khususnya dan proses belajar-mengajar pada umumnya;

- b. Mengadakan pemantauan dan penilaian tentang daya serap pencapaian materi mata pelajaran secara langsung ke sekolah ataupun melalui sumber informasi rutin yang disampaikan oleh kepala sekolah dan penilik atau pengawas;
- c. Membentuk satuan tugas untuk membantu pelaksanaan pengajaran, jika timbul masalah bersama yang membutuhkan pemecahan bersama yang melibatkan pula para pengelola pendidikan;
- d. Membuat laporan berkala tentang daya serap kurikulum mata pelajaran kepada instansi berwenang yang bersangkutan. Laporan ini dapat digunakan untuk memperbaiki sistem pembinaan pada tingkat nasional;
- e. Mengadakan/menyalurkan sarana dan biaya yang dapat membantu meningkatkan pencapaian daya serap kurikulum sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

VII. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT PEMBINAAN

Penilaian pembinaan secara menyeluruh, baik yang berkenaan dengan program, pelaksanaan, maupun hasilnya, dapat memberikan gambaran pembinaan secara menyeluruh. Berdasarkan hasil penilaian, diambil langkah-langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan pembinaan.

1. Program serta Pelaksanaan Penilaian dan Tindak Lanjut Pembinaan

Bertitik tolak dari hal-hal yang positif dan kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di sekolah, program penilaian disusun secara sistematis untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut pembinaan.

Pelaksanaan penilaian dan tindak lanjut pembinaan perlu melibatkan tiga komponen berikut ini :

- a. Orang tua siswa, yang membantu guru dan kepala sekolah dengan mengawasi anak-anaknya secara sungguh-sungguh;
- b. Masyarakat di sekitar anak, yang membantu menanggulangi tingkah laku anak yang menyimpang;
- c. Tokoh-tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam dunia pendidikan, yang dapat turut menggalakkan atau membantu pengadaan sarana dan biaya yang diperlukan demi tercapainya tujuan pengajaran.

2. Hasil Penilaian dan Tindak Lanjut Pembinaan

Hasil penilaian diperoleh dari hasil pemantauan/supervisi, diskusi bersama, dan pendapat serta saran dari tokoh-tokoh masyarakat dan sumber-sumber lain yang bersangkutan. Dengan demikian, gambaran hasil kegiatan dapat dijadikan dasar pembinaan dan umpan balik untuk perbaikan pembinaan berikutnya. Dari hasil penilaian, masalah-masalah yang berkaitan erat dengan perbaikan proses belajar-mengajar dikelompokkan dan data itu diolah serta digunakan untuk menyusun program berikutnya.

3. Penyempurnaan Program Pembinaan Berdasarkan Hasil Penilaian

Hasil penilaian yang telah dirumuskan secara terperinci, ditinjau baik dari hal-hal yang bersifat negatif maupun dari hal-hal yang bersifat positif, dirangkum dalam satu tabel program.

Bertolak dari tabel program itu, disusunlah program tindak lanjut yang lebih baik guna menghindarkan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan program yang telah dilaksanakan.

4. Sumber Informasi dan Data Penilaian

Ruang data khusus yang diciptakan oleh kepala sekolah merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi

perbaikan program pengajaran di sekolah. Data-data itu dapat tersusun dalam tabel, bagan, gambar-gambar, foto, kepustakaan atau dokumen yang bersumber dari atau berhubungan dengan pelaksanaan proses belajar-mengajar. Ruang data khusus/sumber informasi ini, hendaklah dikembangkan di tingkat kecamatan, kabupaten/kodya, dan propinsi. Data yang lengkap dan menyeluruh terdapat di tingkat propinsi.

Kegunaan sumber informasi ini ialah untuk membantu guru memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan sekaligus bermanfaat bagi guru untuk bermawas diri dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar. Di samping itu, data-data ini dapat digunakan oleh guru, kepala sekolah, penilik, pengawas, dan aparat lain yang berkepentingan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar.

VIII. KERANGKA ACUAN PERILAKU

Kerangka acuan yang mencakup berbagai segi pembinaan amat bermanfaat bagi para pembina untuk melakukan penilaian diri sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan. Kerangka acuan pedoman perilaku ini hanyalah sebagai contoh yang belum mencakup seluruh aspek pembinaan. Oleh karena itu, para pembina hendaklah mengembangkan sendiri kerangka acuan pedoman perilaku dalam ragam bentuk yang lain.

Kerangka Acuan Perilaku Kepala Sekolah

1. Membantu memecahkan kesulitan yang dihadapi guru dalam memahami materi/bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak.
2. Membimbing guru dan memberi petunjuk dalam penyusunan persiapan mengajar.
3. Membantu pemecahan masalah atau kesulitan yang dihadapi guru dalam proses belajar-mengajar, termasuk penilaiannya.

4. Memberi bimbingan kepada guru mengenai cara pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan alat bantu belajar-mengajar.
5. Bersama-sama guru mengusahakan cara-cara pemanfaatan lingkungan sekolah untuk kepentingan proses belajar-mengajar.
6. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada guru mengenai cara mengorganisasi siswa/kelas yang sesuai dengan materi, metode penyampaian, dan sarana yang tersedia.
7. Mengadakan kunjungan/pengamatan kelas secara terus-menerus dan membahas hasilnya bersama dengan guru.
8. Mengikutsertakan guru dalam pertemuan-pertemuan KKG/ MGBS.
9. Mendorong guru untuk meningkatkan pengetahuannya.
10. Menjadi teladan di dalam sikap dan tingkah laku.
11. Membimbing guru melaksanakan administrasi sekolah/ kelas.
12. Membina sikap mental guru dalam setiap pertemuan.
13. Mengikutsertakan guru dalam menyusun dan menilai program sekolah.
14. Dapat mendemonstrasikan cara mengajar yang menggunakan pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA) dengan penekanan pada segi afektif.
15. Melakukan anjangan secara kekeluargaan.
16. Menghayati pendapat guru.
17. Memperhatikan kesejahteraan guru.
18. Menjadi pendengar yang baik terhadap keluhan guru.
19. Bersikap terbuka.
20. Mengembangkan dan memupuk sikap kepemimpinan dalam pribadi guru.

Kerangka Acuan Perilaku Penilik Sekolah/Pengawas

1. Penguasaan bahan/materi pelajaran
 - a. Penilik/pengawas memahami Kurikulum
 - b. Penilik/pengawas menguasai materi mata pelajaran
 - c. Penilik/pengawas memahami tujuan tiap mata pelajaran dan peranannya dalam mencapai tujuan sekolah
2. Perencanaan dan Pengembangan Proses Belajar-Mengajar
 - a. Penilik/pengawas menguasai teknik menyusun jadwal mata pelajaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan edukatif.
 - b. Penilik/pengawas menguasai teknik menyusun persiapan mengajar yang benar.
 - c. Penilik/pengawas menguasai teknik penilaian.
 - d. Penilik/pengawas selalu memperhatikan dan berusaha meningkatkan proses belajar-mengajar.
3. Sistem Penyampaian dan Metodologi Pengajaran
 - a. Penilik/pengawas menguasai metodologi mengajar dan penerapannya.
 - b. Penilik/pengawas mau memberi contoh berinteraksi dalam kelas sesuai dengan metodologi yang berlaku.
 - c. Penilik/pengawas menguasai, mendalami, dan sanggup melaksanakan sistem cara belajar siswa aktif (CBSA) dalam interaksi di kelas.
 - d. Penilik/pengawas memberikan petunjuk kepada guru bagaimana cara pelaksanaan sistem belajar kelompok dalam kelas.
4. Pengelolaan Kelas
 - a. Penilik/pengawas memperhatikan penataan ruang kelas.
 - b. Penilik/pengawas memperhatikan organisasi kelompok belajar siswa.
 - c. Penilik/pengawas memperhatikan :
 - 1) daftar hadir siswa;

- 2) persiapan mengajar;
- 3) kesulitan belajar siswa, dan
- 4) pajangan kelas.

5. Penilaian Program dan Hasil

- a. Penilik/pengawas membantu guru-guru agar mampu melaksanakan penilaian belajar dengan penekanan pada ranah afektif.
- b. Penilik/pengawas menilai pelaksanaan program dan hasilnya secara obyektif dan jujur.

6. Bimbingan

- a. Penilik/pengawas membimbing dan memberikan pelayanan kepada guru agar guru lebih memahami anak didiknya.
- b. Penilik/pengawas membantu guru untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru.

7. Pengadaan dan Penggunaan Alat

Penilik/pengawas memberikan petunjuk tentang cara pembuatan dan penggunaan alat pelajaran.

8. Pemanfaatan Ruang dan Perabot

Penilik/pengawas memperhatikan penggunaan ruang belajar dan perabot sekolah, termasuk pemeriksaan buku inventaris.

9. Pemanfaatan Lingkungan

- a. Penilik/pengawas memberi dorongan kepada guru untuk selalu mengadakan kontak dengan BP3, instansi lain yang berkepentingan dengan pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk kemajuan pendidikan.
- b. Penilik/pengawas memberi saran kepada kepala sekolah dan guru agar menggunakan metode yang dapat membangkitkan keaktifan siswa serta pengenalan dan pemanfaatan lingkungan, seperti metode karyawisata dan metode proyek.

- c. Penilik/pengawas memberi saran kepada kepala sekolah dan guru agar mendatangkan manusia sumber.

10. Pengelolaan Sekolah

- a. Penilik/pengawas memperhatikan :
 - keindahan sekolah
 - keamanan sekolah
 - ketertiban sekolah
 - kesehatan sekolah
 - suasana kekeluargaan dalam sekolah.
- b. Penilik/pengawas memperhatikan administrasi sekolah.
- c. Penilik/pengawas memperhatikan daftar hadir gabungan kelas dan daftar hadir guru.
- d. Penilik/pengawas memperhatikan hubungan masyarakat.
- e. Penilik/pengawas memperhatikan kebun sekolah, lapangan olah raga, dan WC serta sarana/prasarana lainnya.

11. Penilik/pengawas Menguasai Teknik Supervisi

12. Hubungan Masyarakat

Penilik/pengawas berhubungan dengan masyarakat, instansi lain, dan organisasi yang berkepentingan dengan pendidikan.

13. Pembinaan Wilayah

- a. Pembagian wilayah tidak berarti perbedaan kebijaksanaan. Pembagian wilayah hanyalah merupakan pembagian tugas garapan, sedangkan kebijaksanaan pembinaan pada hakikatnya sama.
- b. Penilik/pengawas berkomunikasi dengan rekan penilik/pengawas lainnya untuk membicarakan program pelayanan/pembinaan profesional.
- c. Penilik/pengawas memelihara hubungan baik di antara sesama penilik/pengawas wilayah lainnya, kepala sekolah, dan guru-guru dalam wilayah pembinaannya.

IX. P E N U T U P

Pedoman Pembinaan Profesional guru/pengajar Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ini hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, diharapkan hasil pembinaan profesional ini akan meningkatkan perbaikan dalam pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar, sehingga perbaikan pelaksanaan proses belajar-mengajar ini akan meningkatkan pula mutu dan keberhasilan pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

Guru/pengajar Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa hendaknya memperhatikan hal-hal berikut :

Satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses belajar-mengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa adalah kekhususan mata pelajaran ini. Kekhususan ini mencakup sikap dan nilai-nilai yang seyogyanya mempribadi dalam diri guru agar pengajaran/pendidikannya meyakinkan anak didik. Dengan demikian, dituntut sikap keteladanan dari seorang guru/pengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa.

Agar hal ini dapat tercapai, maka pembinaan terhadap guru perlu dilaksanakan dengan seksama. Jika hal ini berhasil, akan kelihatan bahwa guru Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa akan memiliki sikap yang sangat diperlukan untuk menanamkan dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

